



To link to this article: <https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n1.p39-50>

Evaluasi Kebijakan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Lia Fitrianingrum

Biro Administrasi Pimpinan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Email: liatejo@gmail.com

Abstract

This study evaluates the West Java Provincial Government's policy in handling the Covid-19 pandemic by focusing on organizational, substance, and political aspects by mapping targets, supporting factors, obstacles, and impact analysis. The Covid-19 pandemic has brought a tremendous impact on the health sector and economic growth in West Java. Policies related to the pandemic handling by West Java Provincial Government in synergy with the Central Government and Regency/City Governments have been carried out intensely and continuously since the beginning of 2020. Various stimuli were carried out by the West Java government to reduce the spread of Covid-19 as well as to recover economic condition in West Java. The wave of Covid-19 has occurred twice, at the end of 2020 and after Eid in 2021. Various policies have been implemented, and after almost one and half years of running, that policy can be evaluated. This research used the qualitative method. Data collection techniques were carried out by collecting secondary data, observation and interviews. The study results showed that the Covid-19 handling policy in West Java Province, apart from organizational, substance and political elements, a crucial element as the driving force for the optimal COVID-19 handling policy was the community support and participation (human society), which had been tested during the crisis. It is proven that currently, West Java Provincial Government can reduce the mortality rate of COVID-19 patients and the occupancy of hospital beds below WHO standards. The limitations of this research only look at the three elements that become the instrument of policy evaluation. The policy recommendations offered are implementing a stimulus program in the form of affirmative policies and program-based budget support in the work to reactivate the real sector and encourage the growth of people's purchasing power and create a communication forum that can promote economic recovery in West Java.

Keywords: Policy evaluation, Covid-19, West Java Provincial Government

Evaluation of the West Java Provincial Government's Policy on Covid-19

Abstrak

Artikel ini membahas evaluasi kebijakan penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menitikberatkan kepada aspek organisasi, aspek substansi dan aspek politis dalam penanganan Covid-19 dengan melakukan pemetaan sasaran, faktor pendukung, penghambat dan analisis dampaknya. Pandemi Covid-19 telah membawa dampak yang luarbiasa di sektor kesehatan dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa barat bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dilakukan secara intens dan berkelanjutan sejak awal tahun 2020. Berbagai stimulus dilakukan oleh Pemerintah Jawa Barat guna

Corresponding author(s): Lia Fitrianingrum, Email: liatejo@gmail.com

Article history: Received, 31 August 2021; Revised, 10 November 2021; Accepted, 22 November 2021.

To cite this article: Fitrianingrum, L. (2021). Evaluasi Kebijakan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 06(1), 39–50. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n1.p39-50>

menurunkan angka penyebaran Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Gelombang lonjakan Covid-19 sudah terjadi dua kali yaitu di akhir tahun 2020 dan pasca lebaran tahun 2021. Berbagai kebijakan telah diimplementasikan, dan setelah hampir satu setengah tahun berjalan, kebijakan penanganan Covid-19 ini sudah dapat dievaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder, observasi dan wawancara. Hasil kajian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa barat selain melibatkan unsur organisasi, substansi dan politis maka ada unsur yang sangat penting yang merupakan pendorong kebijakan penanganan covid ini optimal, yaitu dukungan dan partisipasi masyarakat (human society). Pentingnya peran mereka telah teruji di masa krisis dan terbukti bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Jawa barat dapat menurunkan angka kematian pasien Covid-19 dan keterisian tempat tidur rumah sakit di bawah standar WHO. Rekomendasi kebijakan yang ditawarkan adalah dijalankannya program stimulus berupa kebijakan afirmatif serta dukungan anggaran berbasis program pada karya untuk menggerakkan kembali sektor riil serta mendorong pertumbuhan daya beli masyarakat, dan di buatnya forum komunikasi yang dapat mendorong pemulihan ekonomi di Jawa Barat. Keterbatasan penelitian ini adalah kajian hanya melihat dari ketiga unsur yang menjadi instrument evaluasi kebijakan.

Kata kunci: evaluasi kebijakan, Covid-19, Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

PENDAHULUAN

The World Health Organization (WHO) mendeklarasikan wabah Covid-19 yang diawali di Wuhan Cina pada tanggal 30 Januari 2020 sebagai sebuah "Public Health Emergency of International Concern", dan meningkatkan status keadaannya menjadi pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 (Nikos, Konstantinos, & Bertrand, 2020) untuk seluruh kota di dunia termasuk Indonesia.

Dampak adanya pandemi Covid-19 mempengaruhi segala aspek kehidupan, di antaranya aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, kesejahteraan masyarakat serta mobilitas. (Hawryluck, 2004) Efeknya pun membuat segala bentuk mobilitas, baik itu mobilitas manusia, barang maupun jasa yang sebelumnya sudah biasa dilakukan, sekarang menjadi serba terbatas dikarenakan pandemi Covid-19. Seorang ahli virologi di Amerika Serikat mencatat bahwa menghentikan perjalanan adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran virus (Upton, 2020).

Negara-negara lain telah menerapkan berbagai macam kebijakan guna menahan laju penyebaran Covid-19, di antaranya menerapkan kebijakan lockdown, pembatasan jarak sosial, pembatasan penerbangan Internasional dan penangguhan sektor bisnis untuk sementara waktu. (Nikola, Angela, & Emily, 2020). Untuk Indonesia, dikarenakan pemerintah pusat tidak ingin mengambil resiko jika kondisi ekonomi akan memburuk, maka pemerintah pusat menginstruksikan pemerintah daerah agar menerapkan suatu kebijakan pembatasan sosial tanpa menerapkan lockdown (Arif, 2020). Perkembangan kasus Covid-19 di level Nasional seperti table 1:

Tabel 1. Perkembangan Covid-19 Nasional

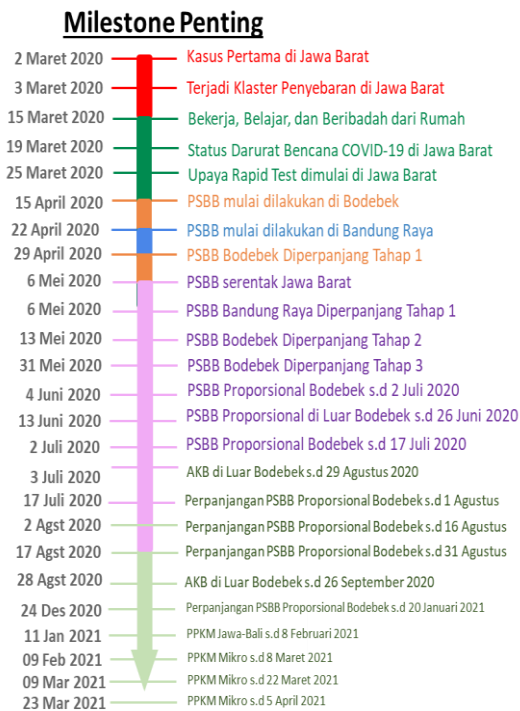
Provinsi	Ter-konfirmasi	Kasus Aktif	Penambahan	Sembuh	Me-ninggal
DKI Jakarta	848.266	7.717	574	827.299	13250
Jawa Barat	686.362	27.706	5.058	645.331	13325
Jawa Tengah	465.843	26.758	811	410.985	28100
Jawa Timur	378.135	15.992	1.354	334.779	27434
Kalimantan Timur	148.491	8.778	637	134.742	4971
DI Yogyakarta	147.531	15.052	785	127.772	4707
Banten	127.991	4.716	239	120.684	2591
Riau	121.555	7.422	555	110545	3588

Sumber: Covid19.go.id pertanggal 26 Agustus 2021, jam 16.00 WIB

Dari table 1 di atas terlihat bahwa Provinsi Jawa Barat berada di peringkat ke dua setelah provinsi DKI Jakarta dengan kasus aktif 27.706 dan terkonfirmasi sebanyak 686.362, dan sampai saat ini di Jawa Barat memiliki 4 (empat) daerah di level 4, 19 (sembilan belas) di level 3 dan 4 (empat) daerah berada di level 2 (Satgas, 2021).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha untuk memberikan kebijakan yang tepat dan aman kepada masyarakatnya dan di tahun 2021 dengan kebijakan terpusat akibat melonjaknya angka Covid-19 pasca lebaran maka diberlakukan PPKM darurat hingga saat ini, seperti gambar 1:

Gambar 1. Perkembangan Pandemi Covid-19 di Jabar



Sumber: Laporan evaluasi penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Barat, akses 7 Agustus 2021

Dari gambar 1 di atas terlihat bahwa kasus pertama Covid-19 di Jawa Barat ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020 dan pada tanggal 15 Maret 2020 mulai diberlakukan bekerja, belajar dan beribadah dari rumah. Tepatnya di tanggal 19 Maret 2020 mulai diberlakukan status darurat bencana Covid-19 di Jawa Barat. Pada Bulan April 2020 mulai diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan di Bogor Depok, Bekasi (Bodebek), kemudian di Bandung Raya, dan selanjutnya kebijakan PSBB diberlakukan serentak di Jawa Barat mulai 6 Mei 2020. Perpanjangan PSBB Bodebek dilakukan secara bertahap sampai dengan 20 Januari 2021.

Perkembangan kebijakan PSBB diubah menjadi kebijakan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM 1), yang diperkuat oleh Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 72/KS.13/HUKHAM tertanggal 8 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Terdapat 20 kabupaten/kota yang harus melakukan PPKM sesuai Imendagri No 1 Tahun 2001 diantaranya kabupaten Sukabumi, kabupaten Sumedang, kabupaten Garut, kota Depok, kabupaten Karawang, kota Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, kota Banjar, kabupaten Ciamis, kota Bandung, kota Bogor, kota Cimahi dan lainnya.

Kebijakan PPKM 1 di Provinsi Jawa Barat juga didukung oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.10-Hukham/2021 Tentang Pemberlakuan

PSBB Proporsional di 20 (duapuluh) Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.TI-Hukham/2021 tentang pemberlakuan Adaptasi kebiasaan Baru di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Kebijakan PPKM 1 berakhir kemudian dilanjutkan dengan PPKM 2, di Provinsi Jawa Barat PPKM 2 dilaksanakan serentak di 27 Kabupaten/Kota periode tanggal 26 Januari-8 Februari 2021. Kebijakan PPKM 2 di Jawa Barat dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 15/KS.01/Hukham tentang perpanjangan pelaksanaan pembatasan kegiatan Masyarakat dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Barat.

Pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2020 dan tahun 2021, kebijakan yang dilakukan Provinsi Jawa Barat dengan mengeluarkan Surat Edaran Gubernur No. 451/64/Yanbangsos tentang penyelenggaraan ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H. Kebijakan tersebut menyebutkan bahwa seluruh ibadah dilaksanakan di rumah, halal bihalal secara daring dan larangan mudik.

Pasca Idul Fitri walaupun sudah dilakukan pengawasan ketat terhadap keramaian dan arus mudik dan balik tetapi kasus Covid-19 melonjak tepatnya pada pertengahan bulan Juni tahun 2021 tepatnya pasca lebaran Idul Fitri. Kebijakan dalam rangka penanganan Covid-19 terus diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menekan laju perkembangan Covid-19 dan setelah berjalan 1,5 tahun maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat baik dari aspek organisasi, aspek substansi dan politis dengan melakukan pemetaan sasaran, faktor pendukung, penghambat dan analisis dampaknya.

Beberapa penelitian terkait evaluasi kebijakan penanganan Covid-19 dilakukan dengan lokus berbeda seperti di DKI Jakarta dengan berbasis data: Kebijakan Pembatasan, Mobilitas Publik dalam Mitigasi Persebaran Covid-19 (Nuzulul, Yudhistira, & Clarissa, 2020), evaluasi kebijakan joko tonggo di Jawa Tengah dalam penanganan Covid-19 yang berhasil meningkatkan citra dan elektabilitas kepala daerah (Rani & Elvira, 2020), evaluasi kebijakan penanganan Covid-19 di kota Surabaya Studi Kasus kebijakan PSBB (Isnain, 2021). Mengevaluasi dampak kebijakan pencegahan COVID-19 pada aspek rantai pasokan yang memuat unsur ketidakpastian (Grida, Rehab, & Nasser, 2020). Penelitian terdahulu tentang penanganan Covid-19 seperti kebijakan Pemberlakuan Lockdown sebagaiantisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19 (Rohim & Rezk, 2020).

Kajian tentang evaluasi kebijakan penanganan Covid-19 dengan lokus di Provinsi Jawa Barat menjadi hal baru untuk dapat memperkaya kajian kebijakan. Disinilah letak kebaruan dari kajian ini dengan menganalisa antara konsep evaluasi kebijakan dengan fakta yang terjadi dilapangan dalam penanganan Covid-

19 khususnya di pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengingat setiap daerah memiliki strategi masing-masing sesuai kebutuhan daerahnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang diajukan dalam kajian ini adalah bagaimana evaluasi kebijakan penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Barat?

Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Barat baik dari aspek organisasi, aspek substansi dan politis dengan melakukan pemetaan sasaran, faktor pendukung, penghambat dan analisis dampaknya.

METODE

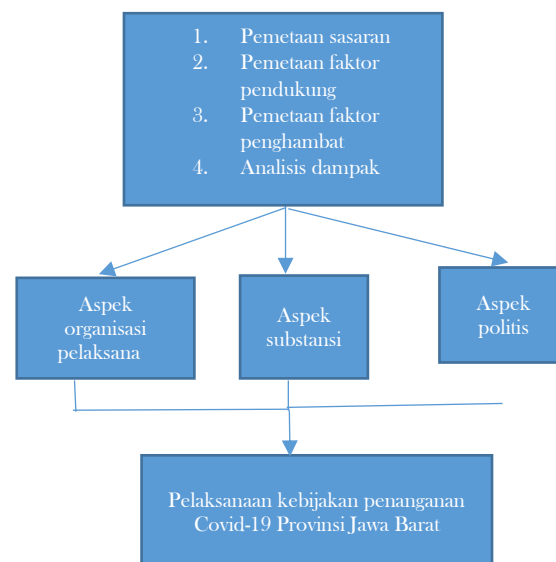
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif seperti yang diungkapkan Creswell bahwa "we conduct qualitative research because a problem or issue needs to be explored (Creswell, 2013) dengan metode analisis deskriptif analitis untuk mengungkapkan dan membahas permasalahan yang dijadikan obyek penelitian. Obyek penelitian dalam kajian ini adalah evaluasi kebijakan penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Barat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder melalui studi kepustakaan dan observasi. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan mempelajari dan mengutip berbagai informasi yang terkait dengan objek penelitian dari berbagai dokumen serta sumber informasi lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dengan sejumlah informan penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview) (Bogason & Zolner, 2007) yang terkait dengan kebijakan evaluasi penanganan Covid-19 di Jawa Barat.

Observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dilakukan dengan melakukan observasi partisipan dimana peneliti melakukan pengamatan langsung dilapangan mengenai masalah yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

Data atau informasi yang diperoleh dalam tahap pengumpulan data diuji keabsahannya (kebenarannya) salah satunya melalui teknik triangulasi sumber data (Patton, 2002). Kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2. Kerangka berpikir penelitian



Sumber: Diadaptasi dari Jones (Jones, 1984)

Berdasarkan kerangka berpikir pada gambar 2 di atas maka proposisi dalam penelitian ini adalah evaluasi kebijakan penanganan Covid-19 Provinsi Jawa barat terkait dengan aspek organisasi pelaksana, aspek substansi dan aspek politis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kebijakan dan evaluasi implementasi dibutuhkan oleh para politisi dan administrator publik, oleh karena dua bidang ini memberikan pengetahuan tentang desain dan efek dari kebijakan (Rosenbloom, 2002). Pada dasarnya pelaksanaan penelitian menggunakan teori evaluasi kebijakan dari Jones (1984:359) sebagai panduan dalam penelitian. Atas dasar ini maka aspek-aspek yang dievaluasi berkaitan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini adalah berkaitan dengan 3 aspek antara lain aspek organisasi pelaksana, aspek substansi dan aspek politis (Jones, 1984).

1. Organizational evaluation

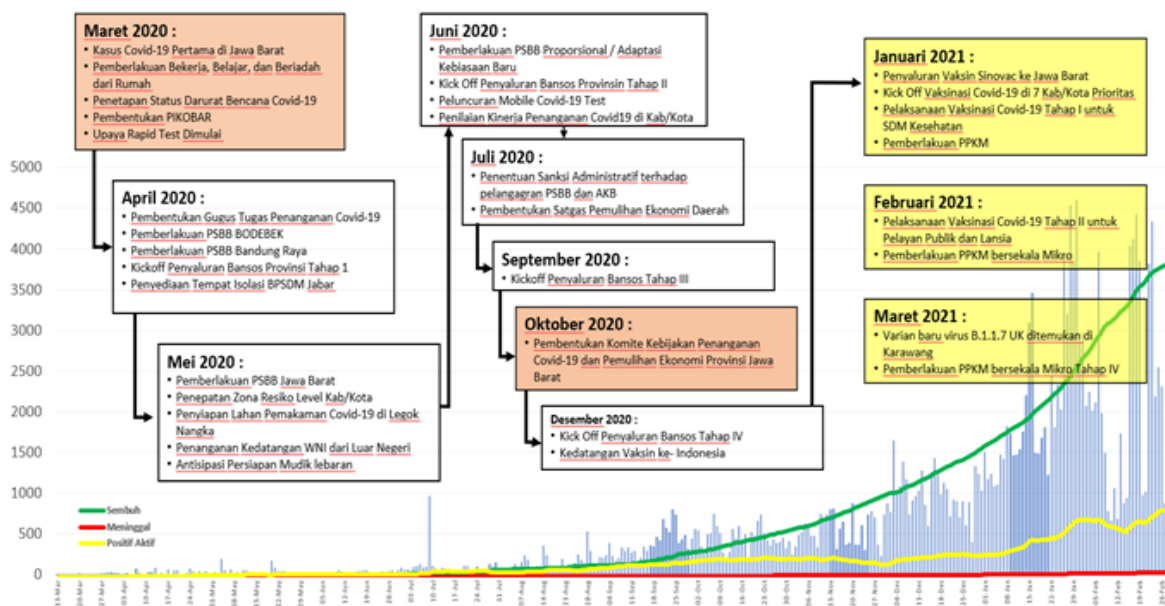
Evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban tentang apakah kebijakan atau program yang dilakukan, melahirkan dukungan bagi badan-badan pelaksana. Apakah manfaat bagi badan-badan tersebut melebihi biaya yang dikeluarkan. Apakah kebijakan yang dilakukan, mengarah pada perluasan lebih lanjut bagi badan-badan tersebut. Aspek yang mendasar adalah menguji kinerja instansi terkait, berkaitan dengan tugas dan kewajibannya dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan covid ini.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara internal organisasi serius menanganani Covid-19 dengan dibentuk Gugus Tugas penanggulangan Covid-19 pada

bulan April 2020, pada bulan Juli 2020 dibentuk satgas pemulihan ekonomi daerah yang bekerja sama dengan kabupaten /kota dan Instansi Pusat seperti Kementerian Kesehatan dan Kemendagri. Pada bulan Oktober 2020 dibentuk komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Provinsi Jawa Barat dengan satgas yang multidisiplin dan multi Organisasi perangkat daerah. Organisasi Internal yang terlibat dalam penanganan Covid-19 meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3AKB, Dinas Pendidikan dsb. Hampir semua satgas Covid-19 ini perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki peran dan fungsi masing-masing.

Berikut disampaikan tahapan penanganan Covid-19 dan komitmen Provinsi Jawa Barat dalam menekan kasus Covid-19 (gambar 3) berikut:

Gambar 3. Tahapan Penanganan Pandemi di Jawa Barat



Sumber: Dinas Kesehatan Jawa Barat, Laporan Mingguan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, Diolah

Pada gambar 3 di atas terlihat bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara internal Organisasi dibawah koordinasi langsung Gubernur Jawa barat dan Sekretaris Daerah Jawa Barat yang merupakan Ketua Pelaksana penanganan Covid-19 memiliki keseriusan dalam penanganan Covid-19 dan dalam upaya pemulihan ekonomi di Jawa Barat. Sumber daya di Provinsi di Jawa Barat dikeluarkan secara optimal dari sisi anggaran, koordinasi antar OPD, kerjasama dalam satgas dan komite penanganan Covid-19. Dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan model pentahelik bersama akademisi, bisnis, komunitas, Pemerintah, media. Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Universitas Padjajaran, Universitas Indonesia

dilakukan dalam upaya pengadaan tenaga medis baik dokter ataupun perawat yang masih kurang di Provinsi Jawa Barat dan sukarelawan dalam membantu masyarakat yang isoman serta penyediaan sentra-sentra vaksinasi. Media sebagai sarana informasi dan dapat memberikan informasi pada masyarakat, salah satunya bahwa Pemda Provinsi Jawa Barat memiliki program unggulan satu data Pikobar yang secara lengkap memberikan informasi terkait perkembangan Covid-19 di Jawa Barat dan dapat melakukan konsultasi online, permintaan obat, oksigen secara online dan persyaratan yang mudah. Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan bisnis seperti perusahaan Toyota berbagi bekerja sama dengan RS UI Depok dalam upaya percepatan vaksinasi dengan membentuk sentra vaksinasi, PT Pusri dalam pengadaan oksigen. Pemda Provinsi Jawa Barat juga berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, pemda Kabupaten Kota dan provinsi

melalui satgas Covid-19 dimasing-masing Kabupaten Kota dalam pengadaan dan distribusi vaksin serta oksigen. Komunitas dalam hal ini organisasi masyarakat, organisasi pengusaha, yayasan berkontribusi dalam mempercepat penyuntikan vaksinasi dengan program vaksinasi mandiri. Peningkatan jejaring dalam upaya penanganan Covid-19 juga dilakukan dengan bekerjasama dengan investor lokal maupun Luar negeri dalam pemenuhan kebutuhan oksigen di Jawa Barat seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dalam west java partnership, pada acara west java business roundtable dengan Uni Eropa dan perusahaan multinasional dalam hal pemenuhan kebutuhan oksigen di Jawa Jawa Barat, sehingga saat ini stok oksigen di Jawa Barat surplus dan dapat

membantu daerah dari Provinsi lain yang masih membutuhkan.

Dalam penanganan Covid-19, upaya yang dilakukan pemerintah Jawa Barat telah dilakukan dengan berbagai regulasi yang dikeluarkan baik berupa Surat Edaran Gubernur, Keputusan Gubernur dan Peraturan Gubernur disesuaikan dengan kondisi penanganan saat itu. Dari sisi kelembagaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat serius menangani Covid-19 dengan membentuk gugus tugas penanganan covid, komite kebijakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dan Satgas oksigen bekerjasama dengan Kabupaten/kota. Dukungan Anggaran melalui refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan menunda proyek-proyek infrastrukturnya. Infrastruktur berbasis digital juga diluncurkan oleh pemda Provinsi Jawa Barat seperti aplikasi pikobar, menambah ketersediaan tempat tidur dan ruang ICU di RS di wilayah Jawa Barat, memberdayakan desa dengan penyediaan sentra-sentra isoman di tingkat desa serta pemberian bantuan sosial yang dikoordinir oleh Dinsos untuk penyaluran kepada masyarakat terdampak.

Faktor penghambat dalam penanganan Covid-19 dari internal organisasi tidak ada, mengingat semua unsur OPD dan ASN Provinsi Jawa Barat bahu membahu dalam penanganan Covid-19 dan membantu masyarakat melalui program-program yang dicanangkan Pemda Provinsi Jawa Barat seperti ASN berbagi, ASN borongdong untuk menggairahkan UMKM di Jawa Barat, dan pemberian bantuan sosial dari ASN Jawa Barat. Faktor penghambat dari eksternal organisasi adalah distribusi jumlah vaksin yang tidak proporsional dibandingkan dengan jumlah target vaksinasi di Jawa Barat dan kesiapan masyarakat dalam menerima vaksin Covid-19 yang belum merata.

2. Substantive evaluation

Evaluasi substantif atau bersifat nyata yaitu evaluasi yang dilakukan untuk melihat apakah kebijakan atau program yang dilakukan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik secara hukum maupun dalam detail kebijakan yang ingin dicapai selanjutnya, serta apa dampak kebijakan atau program tersebut bagi persoalan yang dituju.

Kebijakan penanganan Covid-19 selama kurun waktu Maret 2020 sampai dengan Agustus 2021 telah mencapai tujuan yang diharapkan yaitu menekan laju pertumbuhan Covid-19 di Jawa Barat.

Hal ini terlihat dari Perkembangan Tingkat Keterisian Tempat Tidur (*Bed Occupancy Rate*) Jawa Barat, seperti terlihat pada gambar 4.

Berdasarkan gambar terlihat bahwa Tingkat Keterisian tempat tidur isolasi Covid-19 di Rumah Sakit (BOR) pada masa PPKM Mikro 1 yang di mulai sejak 7 Februari 2020 dengan keterisian 63,38% dan terus mengalami penurunan BOR dan puncak penurunan BOR pada masa PPKM Mikro ke 7 tanggal 4 s.d 17 Mei 2021, dengan prosentasi keterisian 29,17%. Jumlah tempat tidur isolasi Covid-19 di Rumah sakit kembali melonjak dengan sangat tajam pada PPKM Mikro ke 10 tanggal 15 s.d. 29 Juni 2021 dengan prosentase 90,69%. Kejadian ini terindikasi pasca Idul Fitri, dimana banyak warga yang masih bersilaturahmi dengan keluarga, saling mengunjungi dalam kota atau kota sekitar dan masih melakukan mudik secara tersembunyi. BOR mengalami Penurunan menjadi 19,92% Per tanggal 26 Agustus 2021.

Fluktuasi jumlah tempat tidur keterisian tempat tidur (*Bed Occupancy Rate*) Jawa Barat merupakan salah satu wujud implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Jawa barat. Kebijakan penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Barat dilakukan baik secara terpusat, kebijakan Pemerintah Pusat maupun berdasarkan wewenang kewilayahan Provinsi dan Kabupaten/kota.

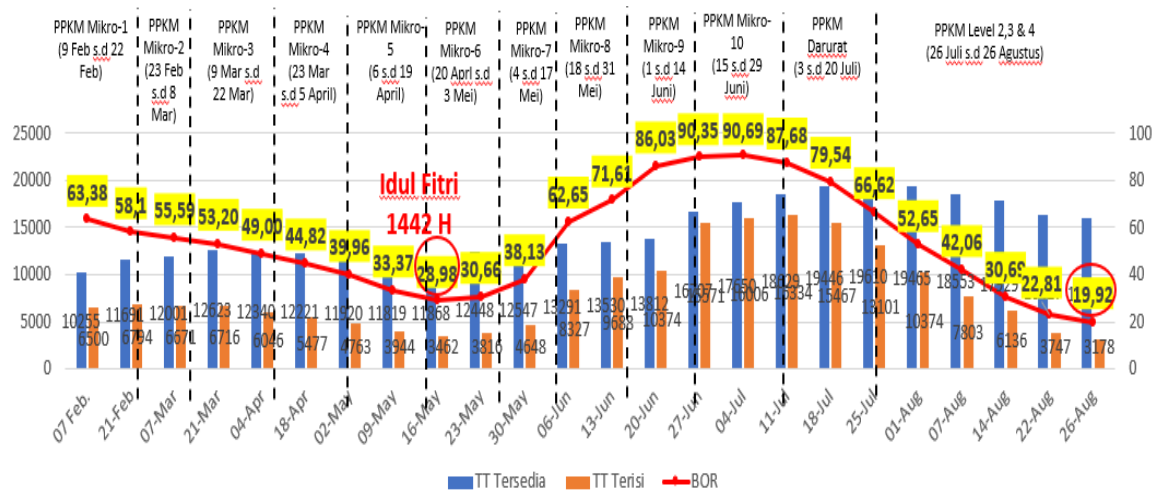
Turunnya keterisian tempat tidur di Rumah Sakit diimbangi dengan perkembangan tingkat kesembuhan di Jawa Barat seperti dapat terlihat pada gambar 5.

Dari gambar 5 terlihat bahwa Tingkat Kesembuhan per tanggal 22 Agustus 2021, Jawa Barat 94,02% dan Nasional 90,76%. Pada periode tanggal 26 Agustus 2021 tingkat kesembuhan kasus Covid-19 Jawa Barat Naik 3,74% dari minggu sebelumnya. Dari data tersebut masih ada 3 Kabupaten /Kota dengan tingkat kesembuhan terendah yaitu Kabupaten Tasikmalaya 69,70%, Kabupaten Subang 82,92% dan Kabupaten Indramayu 86,09%.

Apabila dilihat dari perkembangan kematian harian selama PPKM level 2, 3 dan 4, terlihat pada gambar 6.

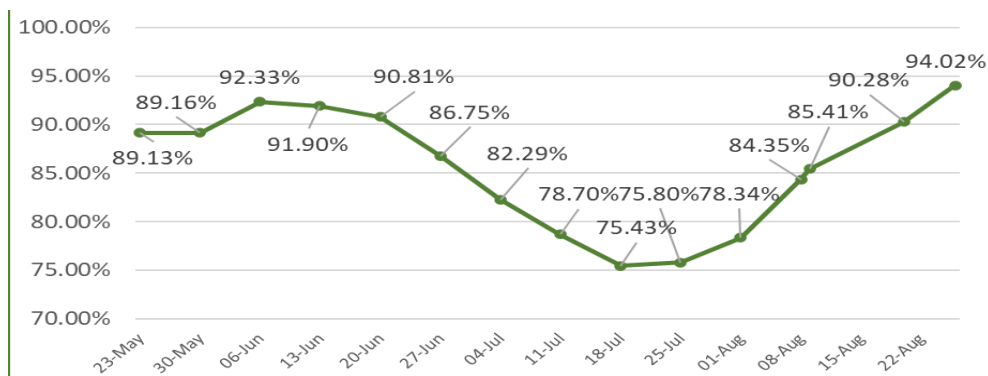
Dari gambar 6 terlihat bahwa kematian harian per tanggal 29 Agustus 2021 ada 12 kasus menurun dari hari sebelumnya sebesar 58,63%, yang artinya bahwa perkembangan tingkat kesembuhan juga diiringi dengan perkembangan kematian yang juga menurun.

Apabila dilihat lebih dalam pada zona resiko Kabupaten/Kota di Jawa Barat maka terlihat pada tabel 2.

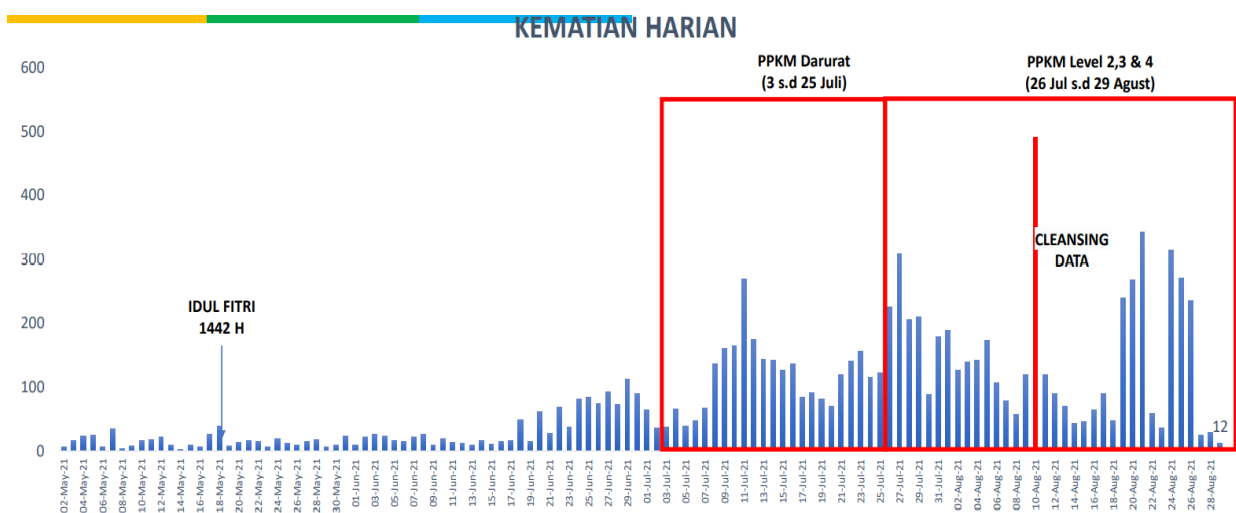
Gambar 4. Perkembangan Tingkat Keterisian Tempat Tidur (*Bed Occupancy Rate*) Jawa Barat

Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Data diolah, 26 Agustus 2021

Gambar 5. Perkembangan Tingkat Kesembuhan Kasus Covid-19 di Jawa Barat

Sumber: New All Record, Bersatu Lawan Covid-19, <https://data.covid19.go.id/>, data diolah

Gambar 6. Indikator kematian selama PPKM level 2, 3, dan 4



Sumber Dinkes Jabar, data diolah. 29 Agustus 2021

Tabel 2 Peta resiko kabupaten/kota di Jawa Barat

No	Kabupaten/ Kota	TRANSMISI KOMUNITAS		Ket.	KAPASITAS RESPON		Ket.	ASESMEN SITUASI COVID-19		Ket.	
		21 Agust 2021	28 Agust 2021		21 Agust 2021	28 Agust 2021		21 Agust 2021	28 Agust 2021		
1	BANDUNG	1	1	Tetap	TERBATAS	TERBATAS	Tetap	2	2	Tetap	0 KAB/KOTA TINGKAT 4
2	BANDUNG BARAT	1	2	Naik	TERBATAS	TERBATAS	Tetap	2	3	Naik	
3	BEKASI	2	2	Tetap	TERBATAS	TERBATAS	Tetap	3	3	Tetap	19 KAB/KOTA TINGKAT 3
4	BOGOR	2	2	Tetap	TERBATAS	TERBATAS	Tetap	3	3	Tetap	
5	CIAMIS	3	2	Turun	TERBATAS	TERBATAS	Tetap	3	3	Tetap	
6	CIANJUR	4	1	Turun	TERBATAS	TERBATAS	Tetap	4	2	Turun	
7	CIREBON	3	3	Tetap	TERBATAS	TERBATAS	Tetap	3	3	Tetap	
8	GARUT	1	1	Tetap	TERBATAS	TERBATAS	Tetap	2	2	Tetap	
9	INDRAMAYU	2	1	Turun	TERBATAS	TERBATAS	Tetap	3	2	Turun	
10	KARAWANG	2	2	Tetap	TERBATAS	TERBATAS	Tetap	3	3	Tetap	
11	KUNINGAN	2	2	Tetap	TERBATAS	TERBATAS	Tetap	3	3	Tetap	
12	MAJALENGA	1	1	Tetap	TERBATAS	TERBATAS	Tetap	2	2	Tetap	
13	PANGANDARAN	3	2	Turun	TERBATAS	TERBATAS	Tetap	3	3	Tetap	
14	PURWAKARTA	3	2	Turun	TERBATAS	TERBATAS	Tetap	3	3	Tetap	
15	SUBANG	1	2	Naik	TERBATAS	TERBATAS	Tetap	2	3	Naik	
16	SUKABUMI	4	1	Turun	TERBATAS	TERBATAS	Tetap	4	2	Turun	
17	SUMEDANG	1	1	Tetap	TERBATAS	TERBATAS	Tetap	2	2	Tetap	
18	TASIKMALAYA	1	1	Tetap	TERBATAS	TERBATAS	Tetap	2	2	Tetap	
19	KOTA BANDUNG	3	3	Tetap	TERBATAS	TERBATAS	Tetap	3	3	Tetap	
20	KOTA BANJAR	3	3	Tetap	TERBATAS	TERBATAS	Tetap	3	3	Tetap	
21	KOTA BEKASI	3	3	Tetap	TERBATAS	TERBATAS	Tetap	3	3	Tetap	8 KAB/KOTA TINGKAT 2
22	KOTA BOGOR	4	3	Turun	TERBATAS	TERBATAS	Tetap	4	3	Turun	
23	KOTA CIMAHI	3	3	Tetap	TERBATAS	TERBATAS	Tetap	3	3	Tetap	
24	KOTA CIREBON	4	4	Tetap	TERBATAS	SEDANG	Turun	4	3	Turun	
25	KOTA DEPOK	3	3	Tetap	TERBATAS	TERBATAS	Tetap	3	3	Tetap	
26	KOTA SUKABUMI	4	3	Turun	TERBATAS	TERBATAS	Tetap	4	3	Turun	
27	KOTA TASIKMALAYA	3	3	Tetap	TERBATAS	TERBATAS	Tetap	3	3	Tetap	
											1. Kab. Subang
											2. Kab. Purwakarta
											3. Kab. Pangandaran
											4. Kab. Kuningan
											5. Kab. Karawang
											6. Kab. Cirebon
											7. Kab. Ciamis
											8. Kab. Bogor
											9. Kab. Bekasi
											10. Kab. Bandung Barat
											11. Kota Tasikmalaya
											12. Kota Sukabumi
											13. Kota Depok
											14. Kota Cirebon
											15. Kota Cimahi
											16. Kota Bogor
											17. Kota Bekasi
											18. Kota Banjar
											19. Kota Bandung

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2021

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2021, diakses 29 Agustus 2021

Tabel 3 Kecepatan vaksinasi kab/kota di Jawa Barat

Kabupaten / Kota	Target Sasaran	Target Jumlah Dosis (Sasaran x 2)	Cakupan Vaksinasi (Total Dosis 1 & 2)	% Cakupan Total	Kecepatan Saat ini (Rata2 7 hr)	Jumlah Hari Menuju 31 Desember	Kecepatan Ideal per hari (7 Hari Kerja)	Selisih Kecepatan Ideal dengan Existing	Estimasi Selesai dengan kecepatan existing	Lama Waktu Yang Dibutuhkan (Hari)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kota Cimahi	453.431	906.862	387.236	42.70%	7.200	128	4.060	3.141	2021-11-05	72
Kota Bandung	1.952.358	3.904.716	1.799.663	46.09%	26.442	128	16.446	9.997	2021-11-12	80
Kota Bogor	819.444	1.638.888	676.655	41.29%	11.375	128	7.517	3.858	2021-11-17	85
Kota Cirebon	262.198	524.396	217.379	41.45%	2.672	128	2.399	273	2021-12-17	115
Kota Banjar	160.353	320.706	124.852	38.93%	1.173	128	1.530	-357	2022-02-07	167
Kota Sukabumi	269.834	539.668	213.850	39.63%	1.919	128	2.545	-626	2022-02-10	170
Kabupaten Sumedang	923.200	1.846.400	339.493	18.39%	6.805	128	11.773	-4.968	2022-04-03	221
Kabupaten Pangandaran	344.196	688.392	141.867	20.61%	2.375	128	4.270	-1.895	2022-04-12	230
Kota Depok	1.613.557	3.227.114	630.440	19.54%	10.265	128	20.287	-10.022	2022-05-04	253
Kota Bekasi	2.016.006	4.032.012	932.028	23.12%	11.199	128	24.219	-13.019	2022-05-28	277
Kabupaten Karawang	1.917.354	3.834.708	694.271	18.10%	10.705	128	24.535	-13.830	2022-06-14	293
Kabupaten Kuningan	922.959	1.845.918	283.883	15.38%	5.227	128	12.203	-6.976	2022-06-19	299
Kota Tasikmalaya	560.243	1.120.486	220.345	19.67%	2.990	128	7.032	-4.042	2022-06-22	301
Kabupaten Bekasi	2.417.794	4.835.588	786.482	16.26%	13.415	128	31.634	-18.218	2022-06-22	302
Kabupaten Bandung Barat	1.396.176	2.792.352	509.544	18.25%	6.982	128	17.834	-10.852	2022-07-17	327
Kabupaten Purwakarta	776.831	1.553.662	225.100	14.49%	3.498	128	10.379	-6.881	2022-09-08	380
Kabupaten Indramayu	1.462.940	2.925.880	329.294	11.25%	6.221	128	20.286	-14.065	2022-10-16	417
Kabupaten Subang	1.285.199	2.570.398	367.470	14.30%	4.414	128	17.210	-12.797	2023-01-06	499
Kabupaten Majalengka	1.047.932	2.095.864	244.445	11.66%	3.706	128	14.464	-10.758	2023-01-06	500
Kabupaten Garut	1.977.713	3.955.426	408.647	10.33%	6.771	128	27.709	-20.938	2023-01-30	524
Kabupaten Cirebon	1.782.964	3.565.928	397.494	11.15%	5.855	128	24.753	-18.898	2023-02-17	541
Kabupaten Bogor	4.216.879	8.433.758	1.065.153	12.63%	12.958	128	57.567	-44.609	2023-03-16	569
Kabupaten Bandung	2.795.219	5.590.438	690.094	12.34%	8.381	128	38.284	-29.903	2023-04-01	585
Kabupaten Sukabumi	2.136.590	4.273.180	410.405	9.60%	4.356	128	30.178	-25.822	2024-01-28	887
Kabupaten Cianjur	1.916.814	3.833.628	332.830	8.68%	3.895	128	27.350	-23.455	2024-02-09	899
Kabupaten Ciamis	998.028	1.996.056	205.793	10.31%	1.876	128	13.986	-12.110	2024-04-05	954
Kabupaten Tasikmalaya	1.481.602	2.963.204	215.612	7.28%	2.701	128	21.466	-18.765	2024-06-07	1.017

Sumber KPCPEN, JDS Pemprov Jabar, Diolah; 25 Agustus 2021

Dari tabel 2 terlihat bahwa 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat sudah berada di level resiko 3 dan 2 yang artinya sesuai Imendagri Nomor 35 tahun 2021 bahwa kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan / atau pembelajaran jarak jauh. Kapasitas maksimal pembelajaran tatap muka terbatas yaitu 50 % untuk satuan Pendidikan, 62 % - 100 % untuk SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, MALB dan 33 % untuk PAUD.

Apabila dilihat dari data kecepatan vaksinasi di Kabupaten/Kota di Jawa Barat maka terlihat pada table 3. Dari tabel 3 terlihat bahwa ada empat Kota diantaranya Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Bogor, dan Kota Cirebon yang akan menyelesaikan vaksinasinya di bulan Desember 2021.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak seperti pelaku usaha, pelaku seni, pasar dan LKS dengan target yang berbeda-beda seperti pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Target bantuan Sosial Provinsi Jawa Barat

Kelompok Penerima Manfaat (KPM)	Jumlah KPM	Nilai Bantuan (Rp)
Pelaku Usaha	10.000 orang	1.000.000
Pelaku Seni	82.650 orang	300.000
Pasar	26.767 orang	250.000
LKS	2.530 Lembaga	3.000.000

Sumber : Laporan penanganan Covid-19 Pemda Provinsi Jawa Barat, akses tgl 29 Agustus 2021

Pada tabel 4 di atas terlihat bahwa Total Penerima Bantuan Sosial Provinsi Jawa Barat 2 sebanyak 72.789 KPM Dengan Nilai Anggaran Yang Disalurkan Sebanyak Rp50.000.000.000.

Berdasarkan evaluasi kebijakan PPKM yang terjadi di Provinsi Jawa Barat hingga saat ini terlihat bahwa terhadap Indikator Kasus kesembuhan meningkat, perkembangan kematian menurun, tingkat keterisian tempat tidur(BOR) menurun. Apabila dilihat dari zona resiko di 27 kabupaten kota berada di level 3 dan 2 sudah tidak ada lagi level 4 dan tingkat kepatuhan meningkat dan berarti bahwa proses pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka dengan prosentase sesuai ketentuan Imendagri No 35 Tahun 2021.

Jika dilihat dari kecepatan progres vaksinasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan terus melakukan percepatan vaksinasi dengan membuka sentra-sentra vaksinasi dengan bekerjasama dengan model pentahelik. Peningkatan 3T (Testing, Tracing dan Isoter) juga terus dilakukan sehingga lebih mempermudah didalam melakukan pelacakan kontak dan isolasi dan kebijakan pengetatan protokol kesehatan yang lebih sistematis juga diterapkan melalui pengawasan berjenjang sampai ke level RT/RW. Dalam kecepatan penyuntikan vaksin, Pemerintah Provinsi

Jawa Barat merupakan Provinsi dengan kecepatan penyuntikan vaksin tertinggi se Indonesia yaitu 200.000 dosis per hari, namun dalam distribusi vaksin bagi Pemda Provinsi Jawa Barat dari Pemerintah Pusat masih terkendala dengan jumlah distribusi vaksin yang masih dibawah target, mengingat Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang jumlah penduduknya paling banyak dibandingkan dengan Provinsi lain yakni 20% dari penduduk Indonesia, yang seharusnya mendapatkan distribusi vaksin dengan persentase yang berimbang sesuai target yaitu 15.000 dosis sehingga herd imunity dapat tercapai di akhir Desember 2021.

Dalam pemberian bantuan sosial bagi masyarakat terdampak dikoordinir oleh Dinas Sosial Pemda Provinsi Jawa Barat dengan sumber bantuan dari berbagai sumber seperti dari Pemprov Jabar, Kemensos, Kemenko PUKM, Kemendes, Kementerian ESD, Kemdikbud, Kemnaker, Sekretariat Negara, Pemkot Bandung, Pemkab Bogor, dan Pemkab Ciamis untuk masyarakat Jawa Barat terdampak. Peningkatan operasi yustisi juga dilakukan oleh Pemda Provinsi Jawa barat untuk penegakan disiplin protokol Kesehatan.

3. Political evaluation

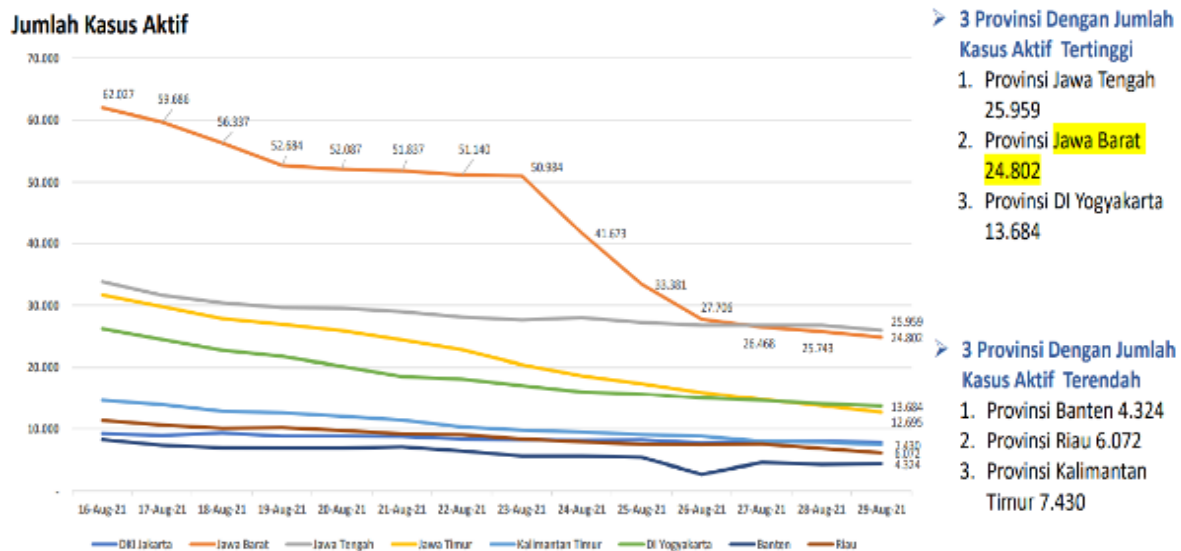
Evaluasi bersifat politis dilakukan untuk melihat apakah program memberikan manfaat bagi negara. Inti dari political evaluation adalah untuk mengevaluasi tentang apakah kebijakan penanganan Covid-19 yang telah diimplementasikan ini, memberikan manfaat untuk kepentingan daerah. Kebijakan penanganan Covid-19 di Pemda Provinsi Jawa Barat memberikan manfaat yang nyata bagi negara atau daerah. Kontribusi Jawa Barat di tingkat Nasional terlihat pada gambar 7.

Dari gambar 7 terlihat bahwa Provinsi Jawa Barat jumlah kasus aktifnya sudah sangat menurun walaupun masih menjadi Provinsi ke dua dengan jumlah kasus aktif tertinggi, tetapi Jawa Barat dengan jumlah penduduk 20% dari jumlah penduduk Indonesia maka kondisi kasus aktif yang trendnya menurun dengan angka penurunan 3,66% merupakan hal yang perlu diapresiasi.

Kebijakan penanganan Covid-19 di Pemda Provinsi Jawa Barat dengan berbagai upaya yang dilakukan mulai dari internal organisasi sampai dengan pemberian bansos, obat gratis dan oksigen gratis ditujukan untuk masyarakat terdampak di Jawa Barat. Program-program strategis di Jawa Barat difokuskan untuk keselamatan masyarakat Jawa Barat.

Selama masa pandemi terdapat tiga gubernur yang menjadi sorotan karena adanya penilaian publik terhadap kinerja kepala daerah dalam melakukan penanganan COVID-19 yang secara masif diliput oleh media massa sehingga dapat meningkatkan citra dan elektabilitas untuk menjadi sosok calon presiden salah satunya adalah Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat sebagai Kepala Daerah sangat serius dalam-

Gambar 7. Perkembangan jumlah kasus aktif Covid-19



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Diolah; 29 Agustus 2021 (Kesehatan D. , 2021)

penanganan Covid-19 dan berkomunikasi dengan media mengenai berita terbaru Covid-19 dilakukan dengan jumpa pers yang secara berkala dilakukan, ada kegiatan Japri (Jabar Punya Informasi) yang juga selalu menginformasikan program-program Pemerintah Jawa Barat dalam rangka penanganan Covid-19 dan capaian Jawa Barat terkait penanganan Covid-19. Komunikasi juga dilakukan gubernur Jawa Barat dalam akun ig atau live ig dengan followernya. Komunikasi dengan media dilakukan selain dengan jump a pers juga dengan wawancara di media online maupun media televisi sehingga kondisi Jawa Barat terkini bisa terinformasikan dengan lebih cepat. Dalam mendukung kinerja Gubernur dalam penanganan Covid-19 juga pemda Provinsi merilis aplikasi pikobar yang merupakan aplikasi 1 data yang terpercaya yang memuat seluruh informasi terkait Covid-19 di Jawa Barat dengan data terbaru.

Kinerja Gubernur Jawa Barat terlihat dari capaian ketersediaan tempat tidur di RS yang semakin menurun, tingkat kematian yang juga menurun yang didukung tingkat kesembuhan yang naik, bansos sudah teralisasi lebih dari 80%, dan mampu memberikan motivasi dan dorongan pada ASN di Jawa Barat untuk berbagi penghasilan membantu masyarakat terdampak. Gubernur Jawa Barat atas inisiatifnya juga melakukan kolaborasi baik ditingkat nasional maupun internasional dalam pengadaan oksigen di Jawa Barat dan pihak terkait dalam pengadaan obat gratis bagi pasien isoman. Dalam rangka pemulihan ekonomi Jawa barat, Gubernur Jawa Barat Bersama Pemda Provinsi Jawa Barat terus berupaya menumbuhkan iklim investasi di Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat masih menjadi destinasi menarik bagi para investor meski dalam situasi pandemi COVID-19. Pada triwulan II 2021,

Jabar menempati peringkat pertama realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan total Rp72 triliun.

Dari total realisasi investasi itu, penyerapan tenaga kerja mencapai sekitar 58.113 lapangan kerja dengan kontribusi terbesar dari investor PMA sebanyak 34.491 orang. Sedangkan penyerapan tenaga kerja dari investor PMDN sebanyak 23.622 orang.

Selain aspek politis, organisasi dan substansi ternyata partisipasi masyarakat dan ketaatan masyarakat dalam mematuhi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda Provinsi Jawa Barat seperti kebijakan PSBB, kebijakan PPKM dsb. menjadi faktor yang penting dalam penurunan perkembangan covid 19 di Jawa Barat. Ada beberapa faktor yang dapat mendukung partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid-19, Timbulnya partisipasi merupakan ekspresi perilaku manusia untuk melakukan suatu tindakan, dimana perwujudan dari perilaku tersebut didorong oleh adanya tiga faktor utama yang mendukung, yaitu kemauan; kemampuan; dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. (Slamet, 2003). Kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengatasi persoalannya pada masa kini guna mencapai kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang (Arnstein, 1969). Dalam hal partisipasi masyarakat Jawa Barat dalam hal ketaatan didasari kesadaran bahwa ketaatan yang dilakukan saat ini akan membawa dampak bagi kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

Penelitian yang diharapkan untuk waktu mendatang adalah mengenai pengaruh partisipasi masyarakat dalam penanganan covid 19 di Provinsi Jawa Barat, sehingga tergambar dengan pendekatan

kuantitatif partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid-19 di Jawa Barat.

KESIMPULAN

Kebijakan penanganan Covid-19 dari awal ditentukannya pandemik Covid-19 di Jawa Barat Maret 2020, telah banyak kebijakan Pemda Provinsi Jawa Barat dikeluarkan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Jawa Barat yang tujuannya untuk keselamatan masyarakat Jawa Barat.

Berdasarkan analisis menggunakan teori Jones yaitu Political Evaluation (evaluasi bersifat politik): kebijakan penanganan Covid-19 terbukti mengurangi secara signifikan kasus positif COVID-19 di Jawa Barat, serta dalam penerapan kebijakan penanganan covid ini dinilai sangat didukung oleh media dengan komunikasi yang baik dan menaikkan elektabilitas Gubernur Jawa Barat sebagai Kepala Daerah. Gubernur Jawa Barat telah berhasil menarik investor sehingga di masa pandemik ini iklim investasi di Jawa Barat tidak menurun dan dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Organization evaluation (evaluasi yang bersifat organisasional) koordinasi antar elemen satgas, komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dan semua OPD dilakukan secara intensif bekerjasama dengan model pentahelik yang melibatkan media, akademisi, komunitas, bisnis, Pemerintah Pusat dan Pemda Kabupaten/kota di Jawa Barat, serta Pemerintah Provinsi lain dan Kabupaten/kota dari Provinsi lain. penggunaan media sosial sangat signifikan dilakukan untuk memberikan perkembangan berita terbaru mengenai kondisi Jawa Barat.

Substantive evaluation (evaluasi yang substansial atau bersifat nyata): kebijakan penanganan Covid-19 tergolong berhasil menurunkan perkembangan Covid-19 di Jawa Barat, dibuktikan dengan BOR RS yang terus menurun, angka kesembuhan meningkat dan angka kematian menurun dan kecepatan penyuntikan vaksinasi yang maksimal dan terbaik se Indonesia. Selain ketiga aspek di atas ada faktor lain yang diperlukan menjadi faktor yang penting dalam penurunan perkembangan covid 19 di Jawa Barat yaitu partisipasi masyarakat secara aktif.

Keterbatasan penelitian ini adalah kajian yang terbatas pada tiga aspek. Aspek-aspek lain di luar ketiga unsur tersebut juga penting untuk dikaji. Namun demikian, penelitian ini dapat memberi beberapa saran dan rekomendasi kebijakan:

- 1) Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu membuat forum komunikasi (Barat, 2021) untuk mencari jalan keluar permasalahan para pelaku dunia usaha agar situasi resesi berkepanjangan tersebut tidak berdampak pada aspek lainnya.
- 2) Forum tersebut diharapkan dapat mendorong pemahaman kedua belah pihak atas situasi yang terjadi dan bersepakat mencari solusi bersama untuk pemulihan ekonomi Jawa Barat

- 3) Diperlukan program stimulus berupa kebijakan afirmatif serta dukungan anggaran berbasis program pada karya untuk menggerakkan kembali sektor riil serta mendorong pertumbuhan daya beli masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, H. (2020). *Terungkap Alasan Jokowi Pilih PSBB Bukan Lockdown*. CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200423075855-4-153804/terungkap-alasan-jokowi-pilih-psbb-bukan-lockdown>.
- Arnstein. (1969). A Ladder Of Citizen Participation . *JAIP. Vol 35. No 4* <http://Lithgow-Schmidt/Sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation>, 216--224 .
- Barat, D. k. (2021). *Perkembangan jumlah kasus aktif Covis 19*. Bandung: Dinas Kesehatan.
- Bogason, P., & Zolner. (2007). Methods for Network Governance Research: An Introduction in P. Bogason & M. Zolner (eds), *Methods in Democratic Network Governance*. New York: Palgrave Macmillan.
- Creswell, J. (2013). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches third Edition*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinas, K. (2021). *Indikator kematian selama PPKM*. Bandung: Pikobar.
- Grida, M., Rehab, & Nasser, A. (2020). Evaluate the impact of COVID-19 prevention policies on supply chain aspects under uncertainty. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, Journal Elsevier*, 1-7.
- Hawryluck. (2004). SARS Control and Psychological Effects of Quarantine. in *Emerg Infect Dis, vol 11*, 206–1212.
- Isnain, Z. (2021). Evaluasi Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Kota Surabaya: Studi Kasus Kebijakan PSBB. *Jurnal Ilmu sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1* , 98-115.
- Jones, C. (1984). *An Introduction to The Study of Public Policy: Third Edition*. California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Kesehatan, D. (2021). *Perkembangan jumlah kasus aktif Covid 19*. Bandung: Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat.

- Kesehatan, K. (2021). *Peta resiko di kabupaten/kota Jawa Barat*. Bandung: Kementerian Kesehatan RI.
- KPCPEN. (2021). *Kecepatan vaksinasi di Jawa Barat*. Bandung: JDS Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Nikola, Angela, & Emily. (2020). Impacts of COVID-19 on Mobility, Preliminary Analysis of Regional Trends Urban Mobility. *in Slocat*, 3.
- Nikos, Konstantinos, & Bertrand. (2020). Lockdown Strategies, Mobility Patterns and COVID-19. *in Discussion Paper Series, IZA Institute Labor Economics*, 1-2.
- Nuzulul, Yudhistira, & Clarissa. (2020). Evaluasi Berbasis Data: Kebijakan Pembatasan Mobilitas Publik dalam Mitigasi Persebaran Mobilitas Publik COVID-19 di Jakarta. *Jurnal Sistem Cerdas 2020 Vol 03 - No 02*, 84-94.
- Patton, M. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods. Edisi Ketiga*. California: Sage Publications.
- Rani, N., & Elvira. (2020). Evaluasi Kebijakan Jogo Tonggo dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, Vol. 4, No. 2, 8-15.
- Rohim, N., & Rezk, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i Vol. 7 No. 3*, 227-237.
- Rosenbloom, D. (2002). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in The Public Sector., Firth Edition*. New York: Mc-Graw-Hill.
- Satgas. (2021). *Laporan Penanganan covid 19 Propinsi Jawa Barat*. Bandung: Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
- Slamet. (2003). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Upton. (2020). Pandemics Are the Dark Side of Global Mobility. *in Nautilus Issue no 84*.